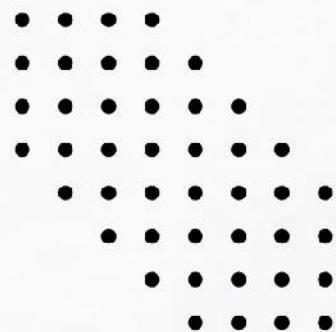




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan
2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2021-2026.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2023 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2023. Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Dinkominfo Kota Pekalongan. Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Dinkominfo Kota Pekalongan. dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsiya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat.

Pekalongan, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMINFO

KOTA PEKALONGAN



ARIE KARYADI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19711017 199903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dapat dikatakan **Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika , adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Keterbukaan informasi Publik (KIP) Tingkat Kota yang ditetapkan 96,00

Berdasarkan penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun penilaian 2023 nilai KIP Kota Pekalongan sebesar 96,62 dengan predikat INFORMATIF sehingga capaian untuk indikator nilai keterbukaan informasi publik tingkat kota pekalongan sebesar 100,54 %

2. Indikator Indeks domain tatakelola SPBE yang ditetapkan 2,95

Berdasarkan penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB tahun penilaian 2023 Indeks domain tata kelola SPBE Kota Pekalongan sebesar 3,29 , sehingga capaian untuk indikator Indeks domain tatakelola SPBE kota pekalongan sebesar 111,53 %

3. Indikator Indeks tata kelola KAMI yang ditetapkan tingkat II

Berdasarkan penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tahun penilaian 2023 Indeks tata kelola KAMI Kota Pekalongan sebesar tingkat II, sehingga capaian untuk indikator indeks tata kelola KAMI kota pekalongan sebesar 100 %

4. Indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral 70%

Berdasarkan penilaian Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo Kota Pekalongan dan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2023 Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kota Pekalongan sebesar 77,73%, sehingga capaian untuk indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral kota pekalongan sebesar 111,04 %

5. Indikator Nilai SAKIP yang ditetapkan 87,00

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Dinkominfo 87,60 dengan kategori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,68%.

6. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan 81,29

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 capaian indeks Kepuasan Masyarakat Dinkominfo memperoleh nilai 95,95 dengan predikat mutu

pelayanan “SANGAT BAIK” Sehingga capaian untuk indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 118,03%.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 KONDISI APARATUR

1.4 ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan bergesernya peran negara dan pemerintah dari peranannya sebagai pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang utama untuk dapat dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan paradigma peran pemerintahan (*governance*) yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik serta melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pembangunannya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa segala bentuk dan hasil akhir pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *stakeholder* utama, pengguna layanan, dan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah tersebut disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berkomitmen bahwa sejak tahap penyusunan Perjanjian Kinerja hingga tahap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada akhir tahun anggaran, senantiasa ter-*publish* kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara penuh untuk dapat melakukan pengawasan terhadap ketercapaian target masing-masing Perangkat Daerah dalam periode anggaran tertentu.

LKJIP sendiri disusun dengan tujuan menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota, selaku pemberi mandat dan kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. LKJIP juga sekaligus digunakan sebagai alat evaluasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Berkaitan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023 berikut akan disajikan secara lengkap LKJIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023. Selain sebagai pemenuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, LKJIP ini juga disusun

untuk memenuhi amanat Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) merupakan suatu Perangkat Daerah bentukan baru Dinas Tipe B, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tugas, pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2021, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
4. Bidang Infrastruktur dan Statistik
 - Seksi Statistik
5. Bidang Aplikasi dan Persandian
 - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan beserta seksi-seksinya adalah sebagai berikut :

A. Tugas

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan Walikota.

Pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No. 71 tahun 2016 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
 2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
 4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
 5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
 6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
 7. penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
 8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
 9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian,
-

- dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

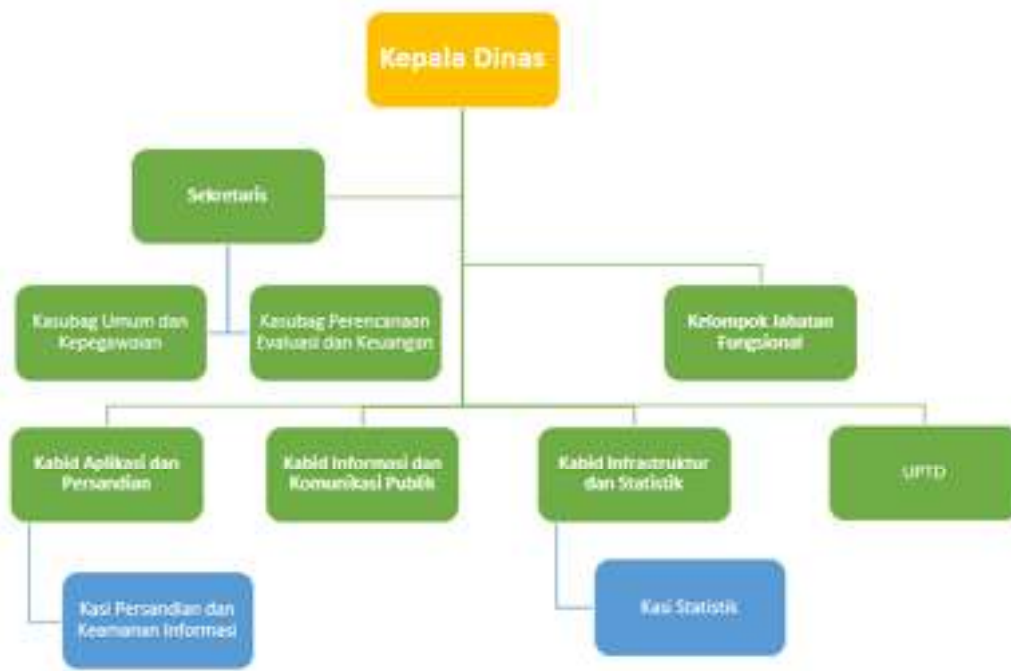
C. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah No. 68 tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan diperbarui dengan Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2021 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
 4. Bidang Infrastruktur dan Statistik
 - Seksi Statistik
 5. Bidang Aplikasi dan Persandian
 - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
-

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021, TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN**



1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kesemuanya berjumlah 118 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

tabel 1.3

Komposisi SDM Dinkominfo Kota Pekalongan Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Pegawai Negeri Sipil		
- Jabatan Struktural	9	7.6 %
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda	3	2.5 %
- Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	1.6 %
- Jabatan Fungsional Umum	7	5.9 %
- Jabatan Fungsional Statistisi Pertama	1	0.8 %
- Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	0.8 %
- Jabatan Fungsional Sandiman Pertama	1	0.8 %
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama	3	2.5 %
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil	2	1.6 %
NON PNS		
- Tenaga Kontrak	1	0.8 %
- Tenaga Kegiatan Dinas Kominfo	33	27.9 %
- Tenaga Kegiatan LPPL RKB	12	10.1 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Batik TV	43	36.4 %
JUMLAH	118	100 %

Sedangkan berikut ini merupakan komparasi jumlah PNS dan Non PNS pada Dinkominfo Kota Pekalongan, yang mana jumlah Non PNS lebih banyak dibandingkan jumlah keseluruhan PNS-nya: PNS = 29 NON PNS = 89

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Golongan

No .	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
	PNS				
1	Golongan I	-	-	0%	0%
2	Golongan II	3	3	9.6%	10.3%
3	Golongan III	24	23	77.4%	79.3%
4	Golongan IV	4	3	12.9%	10.3%
	Jumlah PNS	31	29	100%	100%
	PPPK				
1		-	-	-	-
2					
	Jumlah PPPK	-	-	-	-
	Jumlah Total	31	29	100%	100%

Tabel 1.5

Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2022		2023		2022		2023	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	2	-	1	-	6.4%	-	3.4%	-

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2022		2023		2022		2023	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
4	DIPLOMA I	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DIPLOMA III	4	-	3	-	12.9%	-	10.3%	-
7	DIPLOMA IV	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S-1	22	-	22	-	70.9%	-	75.8%	-
9	S-2	2	-	2	-	6.4%	-	6.89%	-
10	S-3	1	-	1	-	3.2%	-	3.4%	-
	Jumlah	31	-	29	-	100%	-	100%	-

Tabel 1.6

Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
A	Struktural				
1	II.A	-	-	-	-
2	II.B	1	1	3.2%	3.4%
3	III.A	1	1	3.2%	3.4%
4	III.B	3	3	9.6%	
5	IV.A	4	4	12.9%	
6	IV.B	-	-	-	-
	Jumlah A	9	9	29%	
B	Fungsional	-	-	-	-
1	JF Subkoordinator	6	5	19.3%	
2	JF Statistisi Pertama	1	1	3.2%	3.4%
3	JF Sandiman Pertama	1	1	3.2%	3.4%

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
4	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	1	3.2%	3.4%
5	JF Pranata Komputer Pertama	3	3	9.6%	10.3%
6	JF Pranata Komputer Terampil	2	2	6.4%	6.8%
7	JFU	8	7	25.8%	24.1%
	Jumlah B	22	20	70.9%	68.9%
	Jumlah Total	31	29	100%	100%

1.4 ISU STRATEGIS

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam merumuskan lingkungan strategis, Dinkominfo Kota Pekalongan menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinkominfo dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- Adanya perubahan bentuk organisasi dari Kantor menjadi Dinas Tipe B.
- Budaya inovasi terhadap ragam layanan publik yang cukup kuat.
- Kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan Modal operasional, seperti: peralatan dan operasional monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Pekalongan, Infrastruktur SPBE.
- Peningkatan Kualitas Publikasi dengan memanfaatkan media dan LPPL Batik

TV dan Radio Kota Batik (RKB).

2. Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Dinkominfo dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- a. Terbatasnya SDM secara kualitatif dan kuantitatif
- b. Bencana ROB yang melanda Kota Pekalongan
- c. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan informatika
- d. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan siaran pada Batik TV dan radio kota batik
- e. Masih adanya keterbatasan anggaran diklat untuk mendapatkan upgrade ilmu dari lembaga yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

- a. Berkembangnya teknologi dari sisi infrastruktur dan aplikasi sehingga semakin banyak membuka peluang kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Adanya peluang dukungan dan kerjasama penerapan SPBE dari lembaga/organisasi lain.
- c. Adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan informasi publik di Kota Pekalongan.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman terhadap berlangsungnya kegiatan Dinkominfo dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain :

- a. Masih adanya respon dari beberapa OPD dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
 - b. Kurangnya monitoring dari sisi keamanan sistem dan infrastruktur dalam pengelolaan SPBE Tingkat Kota Pekalongan;
 - c. Kurangnya manajemen dalam mengelola aset TIK.
-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
meningkatkan kualitas layanan publik	indeks kepuasan masyarakat	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD
meningkatkan keterbukaan informasi publik	nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat kota	meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit pelayanan informasi publik
mengoptimalkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)	Indeks SPBE	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE
meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	laju pemanfaatan data sektoral	tersedianya data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral
mewujudkan keamanan informasi daerah	indeks keamanan informasi (KAMI)	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	presentase pelayanan informasi publik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	persen	60	70	80	90	100	100
2.	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Persentase layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	indeks	2.75	2.85	2.95	3.05	3.15	3.16
3.	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	persen	55.21	58.79	60.60	62.42	64.24	66.06
4.	Prosentase Perangkat Daerah yang menyediakan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang		I	I	I	I	II	II

	Data Statistik Sektoral	menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah							
5.		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		2,93	3,06	3,20	3,33	3,46	3,60
6.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	tingkat	I	I	I	I	II	II

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	2023	
			satuan	target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Skor	87
		Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100
		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100
		Presentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
2	Meningkatnya Layanan Publik Melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kinerja unit pelayanan komunikasi publik	Skor	96.00
		Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100
3	Meningkatnya tata kelola SPBE melalui Program Aplikasi Informatika	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2.95
		Indeks Aspek Teknologi Informatika dan Komunikasi	Indeks	3.00

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	2023	
			satuan	target
4	Tersedianya data statistic sektoral melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase ketersediaan data statistic sektoral	Persen	70
		Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100
5	Terwujudnya keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks tata kelola KAMI	tingkat	II
		Presentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	2,80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
 - Arahan Operasional
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
 - Akuntabilitas
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
 - Perencanaan
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
 - Pengelolaan
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
 - Penganggaran
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
 - Penyediaan pelayanan kepada pihak luar
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
 - Pengawasan Kerja
-

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
-

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \dots \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = ($$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	nilai keterbukaan informasi publik tingkat kota	nilai Keterbukaan Informasi publik (KIP) tingkat kota	skor	96.00	96.62	100,64	sangat berhasil
2	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	2.95	3.20	108,47	sangat berhasil
3	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	indeks	II	II	100	sangat berhasil
4	meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	70	77,73	111,04	sangat berhasil
5	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP	indeks	87.00	87.60	100,68	sangat berhasil
6	meningkatnya kualitas layanan publik	indeks kepuasan masyarakat	indeks	81.29	95.95	118,03	sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 6 indikator (100%) dikategorikan "sangat berhasil",

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	nilai keterbukaan informasi publik tingkat kota	nilai Keterbukaan Informasi publik (KIP) tingkat kota	skor			96.62	
2	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks			3.20	
3	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	indeks			II	
4	meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen			77,73	
5	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP	indeks			87.60	
6	meningkatnya kualitas layanan publik	indeks kepuasan masyarakat	indeks			95.95	

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	indikator	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	nilai keterbukaan informasi publik tingkat kota	nilai Keterbukaan Informasi publik (KIP) tingkat kota	skor	96.62	97.50	99,09	sangat berhasil
2	meningkatkan tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	3.20	3.25	98,46	sangat berhasil
3	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	indeks	II	II	100	sangat berhasil
4	meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	77,73	80	97,16	sangat berhasil
5	meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP	indeks	87.60	90.00	97,33	sangat berhasil
6	meningkatkan kualitas layanan publik	indeks kepuasan masyarakat	indeks	95.95	82.04	116,95	sangat berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Tujuan	indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.29	95.95	118,03	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96.00	96.62	100,64	Sangat Berhasil
3	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	2.95	3.29	111,52	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	persen	50.00	1795.42	3590,00	Sangat Berhasil
5	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	tingkat	II	II	II	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 5 indikator (100%) dikategorikan "sangat berhasil",

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100,64% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	nilai keterbukaan informasi publik tingkat kota		skor		90,01	96.00	96.62	100.64	97.50

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; telah dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik untuk Kota Pekalongan memperoleh nilai 96,62 atau predikat “Informatif”. keterbukaan informasi publik merupakan instrumen untuk mewujudkan visi besar keterbukaan informasi di Indonesia. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah sebagai implementasi dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Maksud dan tujuannya, ialah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator nilai Keterbukaan Informasi publik (KIP) tingkat kota merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi”

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai KIP Kota Pekalongan dengan daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah Tahun 2023

no	kabupaten/kota	nilai
1.	Kota Semarang	99.63
2.	Kabupaten Banyumas	98.92
3.	Kota Surakarta	98.83
4.	Kabupaten Demak	98.56
5.	Kabupaten Sukoharjo	98.43

6.	Kabupaten Cilacap	98.36
7.	Kabupaten Wonosobo	98.28
8.	Kabupaten Temanggung	97.38
9.	Kabupaten Wonogiri	96.96
10.	Kota Salatiga	96.66
11.	Kota Pekalongan	96.62

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait keterbukaan informasi publik;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di Kota Pekalongan;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi keterbukaan informasi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.8

Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja sasaran 1

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	15.755.000	12,717,000
	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	125.700.000	124,928,813.00
	pengelolaan media komunikasi publik	2.947.804.000	2,926,882,094.00
	pelayanan informasi publik	238.172.000	236,991,790
	layanan hubungan media	1.595.375.000	1,582,973,284
	kemitraan dengan pemangku kepentingan	131.905.000	131,753,000.00
	manajemen komunikasi	362.430.000	360,591,914

	krisis		
	penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	24.420.000	23,665,000
Total		3,153,082,000	3,106,802,801

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,64%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,14%.

SASARAN 2 : Meningkatnya tata kelola SPBE

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 108,47% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	indeks domain tata kelola SPBE	n/a	indeks	2.10	2.40	2.95	3,20	108,47	3.25

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Tabel 3.10
hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2.	Pemerintah kab. Semarang	3.26	Baik
3.	Pemerintah kab. Kendal	2.95	Baik
4.	Pemerintah kab. Demak	3.62	Sangat Baik
5.	Pemerintah kab. Grobogan	3.37	Baik
6.	Pemerintah kab. Pekalongan	2.86	Baik
7.	Pemerintah kab. Batang	3.53	Sangat Baik
8.	Pemerintah kab. Tegal	3.07	Baik
9.	Pemerintah kab. Brebes	2.83	Baik
10.	Pemerintah kab. Pati	3.74	Sangat Baik
11.	Pemerintah kab. Kudus	4.23	Memuaskan
12.	Pemerintah kab. Pemasang	2.94	Baik
13.	Pemerintah kab. Jepara	3.63	Sangat Baik
14.	Pemerintah kab. Rembang	3.64	Sangat Baik
15.	Pemerintah kab. Blora	3.27	Baik
16.	Pemerintah kab. Banyumas	3.39	Baik
17.	Pemerintah kab. Cilacap	3.46	Baik
18.	Pemerintah kab. Purbalingga	3.83	Sangat Baik
19.	Pemerintah kab. Banjarnegara	3.29	Baik
20.	Pemerintah kab. Magelang	3.13	Baik
21.	Pemerintah kab. Temanggung	2.80	Baik

22.	Pemerintah kab. Wonosobo	3.54	Sangat Baik
23.	Pemerintah kab. Purworejo	3.19	Baik
24.	Pemerintah kab. Kebumen	3.70	Sangat Baik
25.	Pemerintah kab. Klaten	3.70	Sangat Baik
26.	Pemerintah kab. Boyolali	3.65	Sangat Baik
27.	Pemerintah kab. Sragen	4.26	Memuaskan
28.	Pemerintah kab. Sukoharjo	4.35	Memuaskan
29.	Pemerintah kab. Karanganyar	3.52	Sangat Baik
30.	Pemerintah kab. Wonogiri	3.94	Sangat Baik
31.	Pemerintah kota Semarang	3.89	Sangat Baik
32.	Pemerintah kota Salatiga	3.26	Baik
33.	Pemerintah kota Pekalongan	3.29	Baik
34.	Pemerintah kota Tegal	3.76	Sangat Baik
35.	Pemerintah kota Magelang	3.36	Baik
36.	Pemerintah kota Surakarta	3.74	Sangat Baik

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait keterbukaan informasi publik;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder yang menyelenggarakan SPBE di lingkungan Kota Pekalongan
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi monitoring dan evaluasi SPBE.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.11

Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja sasaran 2

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2.132.500.000	2.111.337.494
	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	6.600.000	6.500.000
	penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	2.125.900.000	2.104.837.494
	pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.020.582.000	995.465.307
	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	219.330.000	216.770.700
	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	331.619.000	331.039.140
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	347.294.000	326.129.267
	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	73.404.000	73,052.200
	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	29.250.000	28.957.500
	monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	19.685.000	19.516.500
Total		3,153,082,000.	3,106,802,801

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 108,47%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,08%.

SASARAN 3 : Terwujudnya Keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks tata Kelola KAMI	n/a	indeks	I	I	II	II	100	II

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Standar SNI ISO/IEC 27001 mendapatkan pembaruan yaitu SNI ISO/IEC 27001:2022 yang dirilis pada tahun 2022. Sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), SNI ISO/IEC 27001 sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan supaya standar keamanan informasi tetap relevan dengan kondisi terkini.

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait peningkatan kewaspadaan keamanan informasi dalam Mewujudkan keamanan informasi daerah ;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder penyelenggara SPBE;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil dalam perbaikan pada temuan penilaian indeks keamanan informasi pada periode sebelumnya.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.13

Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja sasaran 3

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	69.797.000	67.540.650
	penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	16.075.000	15.958.250
	pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	36.245.000	34.795.500
	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	17.477.000	16.786.900
	penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	5.230.000	5.025.000
	operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	5.230.000	5.025.000
Total		75,027,000.00	72,566,150.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,72%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,39%.

SASARAN 4 : Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 111,04% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	presentase ketersediaan data statistik sektoral	64,29	persen	97,12	98,91	70	77,73	111,04	80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa guna mendukung terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam Satu Data Terpadu Daerah (SDTD).

Dinas Kominfo selaku Walidata Satu Data Terpadu Daerah mempunyai tugas untuk mengelola dan menyediakan data statistik sektoral yang disajikan dalam Portal Satu Data Terpadu Daerah. Persentase ketersediaan data statistik sektoral menjadi indikator capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral urusan statistik pada Dinas Kominfo.

Indikator presentase ketersediaan data statistik sektoral merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi”

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pembina data sektoral (BPS), Walidata (Dinkominfo), Produsen data (OPD) dan Koordinator Forum Data (Bappeda) dalam penyediaan data statistik sektoral.
3. Adanya peran aktif tim pengelola data sektoral (petugas pengelola data OPD) dalam menyediakan data sektoralnya masing-masing.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.13

Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja sasaran 4

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	133.925.000	130.662.700
	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	133.925.000	130.662.700
Total		133.925.000	130.662.700

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 111,04%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,87%.

SASARAN 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100,68% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	83,59	skor	86.16	87.00	87	87.60	100,68	90

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 87,69 atau

predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Indikator nilai SAKIP OPD merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi”

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,6
2	Pengukuran Kinerja	30	24,9
3	Pelaporan Kinerja	15	12,6
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	22,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,6
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Tabel 3.16. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	NILAI TAHUN 2023
1	BAPPEDA	88.10	89.00	85,20
2	DINKOMINFO	87.00	87.00	87.60
3	SETDA	86.30	88.50	72.10
4	DINKES	86.30	87.50	82,15
5	DLH	85.75	87.00	86.00
6	INSPEKTORAT DAERAH	85.65	86.50	82.45
7	BPKAD	84.95	84.50	84.35

8	DINDAGKOP-UKM	84.55	85.50	85.45
9	DPUPR	84.10	84.50	82.90
10	DPMPPA	82.75	83.50	83.35
11	DISDUKCAPIL	82.50	84.00	77.85
12	DKP	82.15	83.00	79.45
13	BKPSDM	82.05	83.00	82,15
14	DINPARBUDPORA	78.15	77.50	71.95
15	DINDIK	77.05	77.50	76.65
16	DPMPTSP	76.05	77.00	76.85
17	DINHUB	75.65	75.50	75.35
18	DINARPUS	75.20	75.50	67.85
19	SEKRETARIAT DPRD	74.70	77.00	70.75
20	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	74.30	75.50	75.50
21	DINPERPA	74.25	75.50	75,75
22	BPBD	74.05	75.50	73,60
23	SATPOL P3KP	73.80	73.00	73.15
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	73.65	75.50	73.70
25	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	73.50	75.50	74.40
26	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	73.50	75.50	74.25
27	DINPERKIM	73.45	83.50	70.85
28	DINPERINAKER	73.40	73.00	73,55
29	DINSOS P2KB	71.75	73.00	72.00
30	BADAN KESBANGPOL	71.70	73.00	70.05

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung

indikator kinerja :

Tabel 3.17

Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja sasaran 5

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.800.000	15.656.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	2.397.750
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.400.000	1.389.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.869.750
Total		15,800,000.00	15,656,500.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,09%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,68%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,60%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.947.966.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 13.714.661.290,- atau sebesar 98,33%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 10.515.623.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.420.248.910,- . atau

sebesar 99,09%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.144.371.000	5.005.405.244	97,30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.800.000	15.656.500	99,09
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	2.397.750	99,91
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.400.000	1.389.000	99,21
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.869.750	98,91
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.373.693.000	3.238.318.380	96,01
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.326.393.000	3.193.762.380	96,01
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.800.000	43.075.000	95,36
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.481.000	98,73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.000.000	71.000.000	100
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	5.000.000	5.000.000	100

	Atribut Kelengkapannya			
8	sosialisasi peraturan perundang-undangan	66.000.000	66.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.230.000	397.150.050	99,98
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000	5.300.000	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.000.000	111.979.550	99,98
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000	114.999.000	100
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	100
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15.360.000	15.301.500	99,62
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.570.000	109.570.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613.751.000	613.258.268	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503.851.000	503.398.640	99,91
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.500.000	107.459.628	99,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	672.897.000	668.743.546	99,38
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.197.000	201.044.356	98,94
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	304.000.000	302.004.150	99,34

	Kantor dan Bangunan Lainnya			
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.700.000	165.695.040	100
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.411.561.000	5.400.502.895	99,25
	pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	5.411.561.000	5.400.502.895	99,25
21	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	15.755.000	12.717.000	80,72
22	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	125.700.000	124.928.813	99,39
23	pengelolaan media komunikasi publik	2.947.804.000	2.926.882.094	99,29
24	pelayanan informasi publik	238.172.000	236.991.790	99,50
25	layanan hubungan media	1.595.375.000	1.582.973.284	99,22
26	kemitraan dengan pemangku kepentingan	131.905.000	131.753.000	99,88
27	manajemen komunikasi krisis	362.430.000	360.591.914	99,49
28	penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	24.420.000	23.665.000	96,91
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.153.082.000	3.106.802.801	98,53
	pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2.132.500.000	2.111.337.494	99,01
29	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	6.600.000	6.500.000	98,48

	dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota			
30	penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	2.125.900.000	2.104.837.494	99,01
	pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.020.582.000	995.465.307	97,54
31	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	219.330.000	216.770.700	98,83
32	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	331.619.000	331.039.140	99,83
33	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	347.294.000	326.129.267	93,91
34	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	73.404.000	73,052.200	99,52
35	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	29.250.000	28.957.500	99,00
36	monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	19.685.000	19.516.500	99,14
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	133.925.000	130.662.700	97,56
	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	133.925.000	130.662.700	97,56
37	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	133.925.000	130.662.700	97,56
	PROGRAM	75.027.000	72.566.150	96,72

	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	69.797.000	67.540.650	96,77
38	penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	16.075.000	15.958.250	99,27
39	pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	36.245.000	34.795.500	96,00
40	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	17.477.000	16.786.900	96,05
	penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	5.230.000	5.025.000	96,09
41	operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	5.230.000	5.025.000	96,09

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kraton Kidul, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berhasil dinobatkan sebagai KIM Terbaik di Bidang UMKM pada ajang Festival KIM 2023. Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Usman Kansong di Gedung Agung Surabaya, Sabtu malam (28/10/2023)



2. Penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Informatika kategori INSTANSI TERBAIK KETIGA PENDAFTARAN PSE, INSTANSI TERBAIK KETIGA PEMANFAATAN MULTIDOMAIN



3. Penghargaan Batik TV Pada Anugerah Penyiaran Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori Program talkshow terbaik 3, Iklan layanan masyarakat terbaik 2, presenter pria terbaik 2, presenter wanita terbaik 3 yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Tengah



4. Penghargaan Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan memperoleh nilai 87 dengan kategori A “Memuaskan”



BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung serta melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2023 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa Dinkominfo Kota Pekalongan telah berupaya memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami peningkatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Peningkatan dan Perbaikan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ke depannya akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Peningkatan kemampuan kerja dari SDM (ASN dan Non ASN) yang dimiliki.
- b. Peningkatan dukungan keuangan dan sarana prasarana untuk mencapai layanan komunikasi dan informasi sesuai standardisasi.
- c. Senantiasa memantau dan mengolah informasi yang diperoleh dari tren/kebutuhan masyarakat terkini dan dari hasil studi ke Perangkat Daerah sejenis.
- d. Melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informatika dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang diperlukan.

1.3. Penutup

Demikian laporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai realisasi rencana kerja tahun 2023.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja

keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para Bidang, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf dan tenaga kegiatan lainnya yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan diatas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pekalongan dimasa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and good government), serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Pekalongan, 15 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMINFO
KOTA PEKALONGAN**



ARIF KARYADI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19711017 199903 1 007
